

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Pitlo, A. (2021). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*.
- Wongkar, B.W. (2021). *Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata*. Lex Administratum.
- Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Setiono. (2004). *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Alidar, E. M. K. (2023). *Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Dinas Syariat Islam Aceh.
- Tumbuan, F. B. (1994). *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang Kependidikan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 280.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2005). *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi, S. A., & M.Pd.I. (2011). *Pengantar Seputar Penelitian*. Banjarmasin: ANTASARI PRESS.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Birglijck Wetboek voor Indonesie,
(Staatsblad Tahun 1847)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Direktur Jendral Agraria Direktorat
Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977
("SK Mendagri 1977")

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Harta Peninggalan

Instruksi Balai Staatsblad 1872 No. 166

Peraturan Rumah Tangga Balai Staatsblad 1903 No. 14

Reglement van Hot College van Boedel mesteren to Batavia Staatsblad 1827
No. 231

Reglement of de voog day raadon Staasblad 1927 No. 382

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-UM.01.06 Tahun
1993 Tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum Lingkungan Balai
Harta Peninggalan Departemen Kehakiman

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan, (Buku I :
Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum
dan Perundang-Undangan)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas



PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 96/1973/PN.Plg tanggal 24 Juli 1974
jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No.
41/1975/PT.PERDATA tanggal 14 Agustus 1975

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1 15/Pdt.P/2009/PN. Jaktim
Tanggal 17 Maret 2009

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Sa'roni, S. R. (2006). *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Harta Pailit Setelah Berlakunya UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Siregar, R. M. L., Siregar. (2009). *Curatele (Pengampuan), Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/ 2008 /PN.Jkt.Sel dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.

Syaid, R. A. (2016). *Kewenangan Ojk untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Yang Menghimpun Dana dari Masyarakat (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 50/PDT. SUS-PAILIT/2014/PNIAGA. JKT. PST)* (Doctoral dissertation, UII).

Kahendou, I. P. (2019). *Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Tidak Hadir Pada Saat Warisan Terbuka Menurut Hukum Waris Perdata Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia)

JURNAL ILMIAH

Munarif, M. Tantu, A., Mussaad, A. S., & Arief, H.M. (2022), Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan). *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.2.

Kasra, H. (2016). Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat dari Menguatnya Sistem Keekerabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga. *Doctrinal*, Vol. 1, No. 1.

Yusra, W. A. (2016). Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt. p/2015/Pa. Mdn). *Premise Law Journal*, 2, 14158.

Muchsin. (2003). Disertasi: Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.



- Milayani, O. (2017). Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris Dengan Cara Mengganti atau Bij Plaatsvervulling Menurut Burgerlijk Wetboek.
- Suryati, S. (2013). Keadilan dalam Hukum Waris Islam. *Cakrawala Hukum*, Vol. 15, No. 4.
- Widiarini, F. S., & Anggoro, T. (2022). The Role of Balai Harta Peninggalan as Curator in The Management and Settlement of Bankrupt Assets. *Legal Brief*, 11(2), 964-978
- Drajat, M. I., & Sembiring, T. B. (2024). Analisis KUHPerdata Pasal 345 Terhadap Permohonan Perwalian Atas Anak Dari Saudara Kandung: Studi Putusan Nomor 375/PDT. P/2023/PA. SGM. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 54-68.
- Dzaky, M. (2022). Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam. In *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis: Vol. Vol.3* (Issue No.6).
- Simatupang, T. H. (2018). Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410*, 5632.
- Deni, D. A., Anggraeni, G., Ansori, M. A., & Nurjannah, A. (2021). Pewarisan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Al Naqdu: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(2).
- Sundah, B. (2022). Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 555K/PDT. SUS-PAILIT/2021). *Jurnal Education and development*, 10(3), 351-356.
- Marthianus, W. S. (2019). Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 2(2), 269-282.
- Muslimah, M., & Kartikawati, D. R. (2022). Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 17-31
- Kadir, M. Z. (2022). Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar). *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 562-571.
- Bidasari, A. (2016). Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang

- Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), 29-42.
- Retnaningsih, H. (2021). Pelindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Aspirasi: Jurnal Masalah Masalah Sosial*, 12(2).
- Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2021). Konsep Dan Pengaturan *Legitimate Portie* dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jatiswara*, 36(1), 95.
- Wariwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1.
- Boyoh, N. (2021). Kekuatan Hukum Surat Wasiat sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang. *Lex Privatum*, IX(4).
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177-181.
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *JURNAL BORNEO HUMANIORA*.
- Dewi, E. C. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur. *Perspektif Hukum*, 20(2), 2–19.
- Salsabila, A. Z., & Mujino, P. (2019). Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban. *Notarius*, 12(1), 296–312.
- Willy, W. B., Cornelius, T., & Mercy, S. (2021). Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie dalam Hukum Waris Perdata. *Lex Administratum*, 9(1), 31–40.
- Amelia, M., & Wahyudi, A. (2022). Analisis Yuridis Tentang Pelindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Menurut KUHPperdata. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9901–9910.
- Royani, A. (2015). Kedudukan Anak Non-Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). *Independent*, 3.



- Aprianto, H. (2023). Pelindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 75–91.
- Arsyad, G. D. (2024). Pelindungan Hukum Ahli Waris Ashabah Dalam Konsep Penggantian Kedudukan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(1), 75–80.
- Assagaff, S. A., & Franciska, W. (2021). Pelindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 279–290.
- Dewi, A. A. K. K., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2020). Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 11–15.
- Harahap, N. (2018). Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 116–129.
- Heriyani, E., & Yuniarlin, P. (2019). Pelindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Dalam Pembagian Harta Warisan Di Diy. *Transparansi Hukum*, 2(1), 17–30.
- Hidayah, S. (2021). Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris. *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1(2), 122–130.
- Martha, C., Sibarani, R., Franciska, W., & Marniati, F. S. (2024). Legal Protection for Foreign Nationals in the Distribution of Inheritance Rights Related to Land Ownership Rights in Indonesia Pendahuluan Proses pew. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 05(1), 131–152
- Kunadi, L. C., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 281.
- Maulida, R., & Arba, H. A. (2023). Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah. *Private Law*, 1(1), 71–80.
- Nadriana, L. (2019). Pelindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee di Perusahaan Pailit. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(No 1), 93–105.



- Navisa, F. D. (2022). Kedudukan dan Pelindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan. *Arena Hukum*, 15(2), 307–324.
- Permatasari, A., & Desmayanti, R. (2021). Proses Pemberian Royalti Kepada Ahli Waris (Papa T Bob) Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(3), 472–481.
- Pradipta, P. R. (2023). Legalitas Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Kertha Desa*, 11(5), 2439–2447.
- Rahmatika. (2021). Kedudukan Ahli Waris Atas Pembagian Harta Peninggalan Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst). *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 18–35.
- Ramadhan, M. A., & Franciska, W. (2021). Pelindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 279–290.
- Ramdani, A. M., & Nasution, F. U. (2019). Analisi Terhadap Hak Waris atas Utang anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang ditinjau dari Hukum Waris Islam. *Jurnal Poros Padjajaran*, 1(1).
- Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 116–124.
- Puspita, S. D., & Fadhly, F. (2015). Legitieme Portie dalam Hukum Waris Islam di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(2).
- Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. (2021). Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 175.
- Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2021). Konsep Dan Pengaturan Legitimate Portie dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jatiswara*, 36(1)
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(01), 68–86.



ARTIKEL WEBSITE

Rustam, S. H. I., M. H., & Musthofa, S. H. I., M. H. "Hak Anak dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian."
<https://pa-buntok.go.id/wp-content/uploads/2023/12/HAK-ANAK-DAN-HAK-WALI-DALAM-PENETAPAN-PERWALIAN-OK.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2024.

Oktavia Milayani (2017). Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris Dengan Cara Mengganti atau Bij Plaatsvulling Menurut Burgerlijk Wetboek. <https://media.neliti.com/media/publications/225062-kedudukan-hukum-ahli-waris-yang-mewaris-c-32ffb87.pdf>. Diakses November 2023.

Purnamasari, Irma Devita. "Empat Golongan Waris Menurut KUHPperdata."
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-lt4ecc7cf50640b/>, diakses pada November 2023

Suryati, Suryati. "Keadilan dalam Hukum Waris Islam." Cakrawala Hukum, vol. 15, no. 41, 2013. <https://www.neliti.com/publications/23186/keadilan-dalam-hukum-waris-islam#cite> Diakses November 2023

Shintiya, Fabian. Legitieme Portie dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1692/1610/>, diakses pada November 2023.

Misael and Partners, "Hak Waris Anak Luar Kawin."
<https://misaelandpartners.com/hak-waris-anak-luar-kawin-2/>, diakses pada November 2023.

LAIN-LAIN

Hasil Wawancara dengan Responden M dan D

Hasil Wawancara dengan Narasumber Adham Hasan dan Arif Hartavian